



Dinamika Keharmonisan Antarumat Beragama dalam Pengembangan Pariwisata Budaya di Pulau Bali

***Nyoman Gede Mas Wiartha¹, Ni Ketut Mareni², I Md. Sucipta Adnyana³,
A.A. Istri M. Septiviari⁴**

^{1,2,3,4}Politeknik Pariwisata Bali

E-Mail: maswiartha@gmail.com¹; mareni@ppb.ac.id²; adnyanasucipta@gmail.com³;
septiviari16@gmail.com⁴

Abstract

*Cultural tourism plays an important role in Bali's economy and community identity, but faces challenges involving commercialization, ritual changes, and potential interreligious conflict. This study examines interreligious harmony, identifies supporting and inhibiting factors, and formulates strategies for sustainable cultural tourism development. It employs a qualitative descriptive-interpretative approach with an exploratory design. Data were collected through interviews with 24 key informants, participatory observation, and documentation in three traditional villages in Denpasar, Gianyar, and Tabanan from January to June 2025. Data were analyzed thematically and validated through source triangulation, informant confirmation, and research auditing. The findings show that harmony emerges through social cooperation, interfaith dialogue, respect for differences, and deliberation grounded in *menyama braya*. Local wisdom, traditional and religious leaders, community participation, and government support strengthen harmony, whereas commercialization, ritual changes, and cultural homogenization undermine it. The study's novelty lies in integrating religious harmony, customary authority, and commercialization pressures as determinants of sustainable cultural tourism, emphasizing participatory, inclusive governance that preserves local traditions and their sacred values.*

Keywords: *Harmony; Religion; Tourism; Culture.*

Abstrak

Pariwisata budaya berperan penting bagi perekonomian dan identitas masyarakat Bali, tetapi menghadapi tantangan komersialisasi tradisi, perubahan ritual, dan potensi konflik antarumat beragama. Penelitian ini bertujuan menganalisis keharmonisan antarumat beragama, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan strategi pengembangan pariwisata budaya berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-interpretatif dengan desain eksploratif. Data dikumpulkan melalui wawancara terhadap 24 informan kunci, observasi partisipatif, dan dokumentasi pada tiga desa adat di Denpasar, Gianyar, dan Tabanan selama Januari–Juni 2025. Analisis dilakukan secara tematik dengan triangulasi sumber, konfirmasi informan, dan audit penelitian. Hasil menunjukkan bahwa keharmonisan terwujud melalui kerja sama sosial, dialog lintas agama, penghormatan terhadap perbedaan, dan musyawarah berdasarkan nilai *menyama braya*. Kearifan lokal, tokoh adat dan agama, partisipasi masyarakat, serta dukungan pemerintah mendukung keharmonisan, sedangkan komersialisasi, perubahan ritual, dan homogenisasi

budaya menghambatnya. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi keharmonisan beragama, kewenangan adat, dan tekanan komersialisasi sebagai penentu keberlanjutan pariwisata budaya melalui tata kelola partisipatif, inklusif, dan berorientasi pelestarian tradisi.

Kata-kata Kunci: Kerukunan; Agama; Pariwisata; Budaya.

PENDAHULUAN

Pariwisata budaya merupakan sektor penting yang membentuk identitas ekonomi dan sosial masyarakat Bali. Daya tariknya mencakup keindahan alam, kesenian tradisional, keberlangsungan adat, upacara keagamaan, serta kehidupan masyarakat yang beragam. Halimatusa'diah menjelaskan bahwa kerukunan antarumat beragama di Bali didukung kearifan lokal, keteladanan sejarah, serta peran lembaga dan tokoh masyarakat dalam memelihara hubungan sosial secara berkelanjutan.¹ Temuan tersebut menegaskan bahwa keharmonisan sosial menjadi bagian penting dari lingkungan budaya yang menopang pariwisata. Hubungan antarumat beragama perlu dipahami sebagai unsur strategis untuk menjaga keberlanjutan pariwisata budaya Bali sekaligus melindungi nilai sosial yang hidup dalam masyarakat setempat serta turut memperkuat identitas bersama seluruh kelompok masyarakat Bali secara berkelanjutan.

Keberagaman agama di Bali menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan dapat hidup berdampingan melalui kebiasaan sosial, penghormatan terhadap tradisi, dan kerja sama masyarakat. Hubungan tersebut berkembang melalui interaksi sehari-hari umat Hindu, Islam, Kristen, Buddha, serta pemeluk agama lain di lingkungan permukiman dan kegiatan ekonomi. Soi et al. menguraikan potensi hubungan Hindu dan Islam dalam pengembangan pariwisata ramah agama, dengan menempatkan interaksi antarumat sebagai sumber daya sosial bagi keharmonisan dan keberlanjutan peradaban.² Kajian itu menunjukkan bahwa keberagaman memiliki nilai sosial sekaligus potensi pariwisata. Namun, manfaat tersebut bergantung pada kemampuan masyarakat mempertahankan sikap saling menghormati dan melindungi kebebasan setiap orang menjalankan keyakinannya pada berbagai ruang kehidupan bersama di lingkungan masyarakat.

Keharmonisan antarumat beragama penting karena kegiatan pariwisata berlangsung berdampingan dengan ruang kehidupan masyarakat dan pelaksanaan tradisi keagamaan.

¹ Halimatusa'diah, "Peranan Modal Kultural dan Struktural dalam Menciptakan Kerukunan Antarumat Beragama di Bali," *Jurnal Multikultural dan Multireligius* 17, no. 1 (2018): 43–65, <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/harmoni/article/view/207>.

² Andi Bahri Soi et al., "Promoting Religious-Friendly Tourism for Developing Religious Harmony: A Study of Tourist Gaze," *Heritage of Nusantara* 12, no. 1 (2023): 91–117, <https://heritage.kemenag.go.id/index.php/heritage/article/view/701>.

Pengelolaan destinasi yang mengabaikan sensitivitas agama dapat memicu kesalahpahaman, sedangkan pendekatan yang menghormati perbedaan berpotensi memperkuat kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Yamashita membahas hubungan pariwisata, agama, dan perdamaian melalui pengalaman Bali merespons peristiwa bom dengan membangun dialog lintas agama, termasuk doa bersama yang melibatkan pemimpin dan masyarakat berbeda keyakinan.³ Kajian tersebut memperlihatkan keterkaitan perdamaian dengan pengelolaan pariwisata. Keharmonisan perlu dipahami sebagai proses sosial berkelanjutan yang memerlukan pemeliharaan, keterlibatan berbagai pihak, serta perhatian terhadap dinamika lokal saat kunjungan wisatawan meningkatkan perjumpaan sosial dan koordinasi warga lintas komunitas secara langsung.

Kearifan lokal menjadi landasan penting bagi masyarakat Bali dalam membangun hubungan sosial yang menghargai perbedaan. Nilai kebersamaan, penghormatan terhadap adat, dan tanggung jawab kolektif mendorong penyelesaian persoalan melalui komunikasi serta kerja sama. Pujaastawa, Sudana, dan Putro mengkaji daya tarik wisata Pura Langgar dengan menyoroti persaudaraan Hindu-Islam sebagai warisan sosial budaya Bali yang berpotensi dikembangkan dalam pariwisata.⁴ Kajian tersebut menggambarkan bahwa hubungan lintas agama dapat tumbuh melalui ruang budaya yang memiliki makna bersama. Namun, pemanfaatan potensi itu perlu memperhatikan kesakralan dan kepentingan komunitas pemilik tradisi; penghormatan terhadap nilai lokal menjadi dasar pengembangan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan serta tetap menjaga kewenangan komunitas dalam melestarikan warisan budaya lokal.

Perkembangan pariwisata budaya juga menghadirkan tantangan berupa perubahan fungsi tradisi akibat tuntutan pasar dan orientasi ekonomi. Kesenian, upacara, serta simbol keagamaan dapat disesuaikan ketika diperlakukan sebagai atraksi untuk memenuhi harapan wisatawan. Indrianto menjelaskan bahwa pariwisata mendorong perubahan bentuk pertunjukan, nilai budaya, dan pola kehidupan masyarakat Bali, sehingga manfaat ekonomi perlu ditimbang bersama dampak sosialnya.⁵ Perubahan tersebut tidak selalu menghapus nilai tradisi, tetapi dapat memunculkan perbedaan pandangan tentang batas pemanfaatannya. Kondisi ini menuntut tata kelola yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, pelestarian

³ Shinji Yamashita, "Gema Perdamaian: Tourism, Religion and Peace in Multicultural Bali," *Jurnal Kajian Bali* 2, no. 2 (2012): 165–181, <https://ejournal1.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/view/5706>.

⁴ Ida Bagus Gede Pujaastawa, I Putu Sudana, dan Bambang Dharwiyanto Putro, "Daya Tarik Wisata Pura Langgar: Representasi Persaudaraan Hindu-Islam di Bali," *Jurnal Kajian Bali* 9, no. 2 (2019): 521–546, <https://ejournal1.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/view/4391>.

⁵ Agoes Tinus Indrianto, "The Commodification of Culture in Bali in the Frame of Cultural Tourism," *ASEAN Journal on Hospitality and Tourism* 4, no. 2 (2005): 151–165, <https://journals.itb.ac.id/index.php/ajht/article/view/3031>.

budaya, penghormatan terhadap agama, serta hak masyarakat untuk menentukan cara tradisinya dipertahankan agar masyarakat tetap menentukan arah perubahan budaya secara bijaksana dan mandiri demi kepentingan bersama berkelanjutan.

Komodifikasi juga tampak pada kesenian yang menjalankan fungsi ritual sekaligus menjadi hiburan bagi wisatawan. Perubahan konteks pertunjukan dapat memengaruhi cara masyarakat memahami dan mempertahankan makna tradisi yang diwariskan antargenerasi. Putra dan Mahagangga meneliti faktor penyebab komodifikasi Tari Barong di Desa Batubulan, serta menjelaskan perbedaan konteks pertunjukan untuk wisata dan penggunaannya dalam ritual keagamaan masyarakat setempat.⁶ Temuan tersebut menunjukkan perlunya batas yang jelas antara kepentingan komersial dan pelaksanaan tradisi sakral. Walaupun berfokus pada kesenian, penelitian itu relevan untuk memahami tekanan pariwisata terhadap praktik budaya; dampaknya terhadap hubungan antarumat beragama juga perlu ditelaah lebih lanjut demi keberlanjutan identitas budaya lokal di tengah perubahan zaman dan tekanan pasar global.

Perubahan tradisi keagamaan menjadi produk wisata menunjukkan bahwa keberhasilan pariwisata tidak cukup diukur melalui jumlah kunjungan dan pendapatan. Kepentingan masyarakat lokal, makna ritual, dan penghormatan terhadap hari suci perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan destinasi. Iskandar dan Facrura menjelaskan bahwa komersialisasi hari suci melalui paket wisata Nyepi dapat menimbulkan ketegangan antara kepentingan industri pariwisata dan makna keagamaan yang dijaga umat Hindu.⁷ Kajian tersebut menegaskan perlunya pengaturan cermat atas hubungan kegiatan wisata dan pelaksanaan kewajiban keagamaan. Meskipun penelitian terdahulu membahas kerukunan dan komodifikasi secara terpisah, keterkaitan dinamis keduanya dalam pengembangan pariwisata budaya masih membutuhkan kajian terpadu demi menjaga keseimbangan hak beragama dan kegiatan ekonomi pariwisata secara berkelanjutan serta melindungi masyarakat lokal.

Penelitian tentang keharmonisan antarumat beragama dalam pengembangan pariwisata budaya di Bali diperlukan untuk memahami hubungan keberagaman agama, praktik budaya, kepentingan ekonomi, dan keberlanjutan sosial. Kajian ini mengidentifikasi

⁶ Erfa Arya Putra dan I Gusti Agung Oka Mahagangga, "Faktor Penyebab Komodifikasi Tari Barong sebagai Atraksi Wisata di Desa Batubulan," *Jurnal Destinasi Pariwisata* 9, no. 1 (2021): 234–240, https://www.researchgate.net/publication/362884452_Faktor_Penyebab_Komodifikasi_Tari_Barong_Sebagai_Atraksi_Wisata_Di_Desa_Batubulan.

⁷ Eva Tabitha Aurelia Iskandar dan Dewanta Facrura, "Peran Event Budaya Ogoh-Ogoh dalam Memperkenalkan Budaya Asli Bali kepada Wisatawan Lokal," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 11, no. 2 (2026): 300–323, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/55681>.

interaksi antarumat serta faktor sosial, budaya, dan kelembagaan yang memengaruhi keharmonisan, sekaligus menelaah pengaruh pariwisata terhadap toleransi, kerja sama, dan pemaknaan tradisi dengan memperhatikan pengalaman masyarakat setempat, praktik kelembagaan adat, dinamika interaksi di kawasan destinasi, serta kebutuhan pelestarian budaya dan kehidupan bersama jangka panjang secara adil. Bagaimana dinamika keharmonisan antarumat beragama dalam pengembangan pariwisata budaya Bali? Faktor apa yang mendukung atau menghambat terpeliharanya keharmonisan tersebut? Strategi apa yang dapat memperkuat kerukunan sekaligus menjaga kelestarian adat dan kesakralan tradisi masyarakat Bali?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif-interpretatif dengan desain eksploratif untuk mengkaji keharmonisan antarumat beragama dalam pengembangan pariwisata budaya di Bali. Baxter dan Jack menjelaskan bahwa studi kasus kualitatif memungkinkan pengkajian fenomena sosial kompleks melalui konteks nyata, beragam sumber data, dan triangulasi.⁸ Penelitian berlangsung Januari–Juni 2025 di tiga desa adat destinasi wisata budaya, yakni Desa A di Denpasar, Desa B di Gianyar, dan Desa C di Tabanan. Lokasi dipilih berdasarkan relevansi interaksi keagamaan, pelestarian tradisi, dan kegiatan pariwisata budaya. Kajian berfokus pada interaksi sosial, faktor pendukung dan penghambat kerukunan, serta strategi pengembangan wisata yang menghormati keberagaman agama dan adat setempat.

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai fenomena penelitian. Kallio et al. menegaskan bahwa penyusunan pedoman wawancara semi-terstruktur secara sistematis mendukung perolehan data relevan dan tepercaya.⁹ Sebanyak 24 informan kunci dilibatkan, meliputi pemangku adat, tokoh agama Hindu, Islam, dan Kristen, pelaku usaha pariwisata, pemandu wisata, penyelenggara kegiatan budaya, serta pengunjung. Pemilihan informan mempertimbangkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka, sedangkan observasi mencakup kegiatan adat, interaksi lintas agama, dan atraksi budaya.

⁸ Pamela Baxter dan Susan Jack, "Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers," *The Qualitative Report* 13, no. 4 (2008): 544–559, <https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol13/iss4/2/>.

⁹ Hanna Kallio et al., "Systematic Methodological Review: Developing a Framework for a Qualitative Semi-Structured Interview Guide," *Journal of Advanced Nursing* 72, no. 12 (2016): 2954–2965, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jan.13031>.

Kawulich menyatakan bahwa observasi partisipatif membantu memahami perilaku, proses sosial, dan kebudayaan melalui pengamatan langsung serta pencatatan sistematis.¹⁰

Data dianalisis menggunakan analisis tematik melalui pengodean terbuka (*open coding*) dan selektif (*selective coding*) untuk menemukan pola, kategori, serta keterkaitan antartema. Nowell et al. menekankan pentingnya analisis tematik yang sistematis, transparan, dan konsisten demi menghasilkan interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan.¹¹ Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, *member checking*, dan *audit trail* untuk memperkuat ketepatan interpretasi. Enworo menjelaskan bahwa kepercayaan penelitian kualitatif mencakup kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas.¹² Etika dijaga melalui perizinan adat, persetujuan informan, dan anonimisasi identitas sesuai permintaan; temuan kemudian diinterpretasikan berdasarkan literatur pluralisme agama, pariwisata budaya, dan kearifan lokal Bali untuk memahami hubungan kerukunan dan keberlanjutan pariwisata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keharmonisan antarumat beragama di tiga desa adat di Denpasar, Gianyar, dan Tabanan terbentuk melalui interaksi sehari-hari, penghormatan keyakinan, serta pengamalan nilai menyama braya. Wawancara terhadap 24 informan mengungkapkan bahwa kerukunan diwujudkan melalui kerja sama sosial, bantuan dalam situasi suka maupun duka, serta komunikasi antara pemangku adat dan tokoh agama. Observasi kegiatan adat dan pariwisata memperlihatkan bahwa hubungan sosial menghubungkan kehidupan masyarakat dengan penyelenggaraan wisata budaya. Kehadiran wisatawan umumnya diterima selama mematuhi kesepakatan lokal. Namun, penyesuaian jadwal dan bentuk ritual demi kebutuhan wisatawan menimbulkan tantangan yang memerlukan pengelolaan melalui musyawarah bersama.

Penerapan nilai menyama braya menunjukkan bahwa keharmonisan bukan sekadar ketiadaan konflik, melainkan proses berkelanjutan dalam mengelola perbedaan kepentingan. Masyarakat menggunakan musyawarah untuk membahas pelaksanaan adat, kepentingan

¹⁰ Barbara B. Kawulich, "Participant Observation as a Data Collection Method," *Qualitative Inquiry: Research, Archiving, and Reuse* 6, no. 2 (2005): 1–28, <https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/466>.

¹¹ Lorelli S. Nowell et al., "Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria," *International Journal of Qualitative Methods* 16, no. 1 (2017): 1–13, <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1609406917733847>.

¹² Oko Chima Enworo, "Application of Guba and Lincoln's Parallel Criteria to Assess Trustworthiness of Qualitative Research on Indigenous Social Protection Systems," *Qualitative Research Journal* 23, no. 4 (2023): 372–384, <https://www.emerald.com/qjr/article/23/4/372/359623/Application-of-Guba-and-Lincoln-s-parallel>.

ekonomi, dan kegiatan pariwisata di wilayahnya. Pemangku adat berperan penting karena memahami ketentuan, batas kesakralan, serta makna tradisi yang diwariskan lintas generasi. Pelaku pariwisata turut mendukung proses tersebut dengan menyesuaikan kegiatan wisata dan menjelaskan kebiasaan masyarakat kepada pengunjung. Temuan ini menegaskan bahwa keterbukaan terhadap wisatawan tidak berarti menerima seluruh tuntutan pasar, sebab masyarakat tetap mempertahankan kewenangan menentukan perubahan yang sesuai dengan nilai budaya setempat.

Kelembagaan lokal dan dukungan pemerintah daerah turut menentukan keberlanjutan hubungan harmonis antarkelompok agama. Wawancara menunjukkan bahwa pemerintah dan asosiasi pariwisata berkontribusi melalui promosi destinasi, dukungan kegiatan budaya, pembangunan infrastruktur, serta penyelenggaraan acara yang melibatkan masyarakat. Pemangku adat mengatur pelaksanaan ritual dan menjaga norma sosial, sedangkan tokoh agama minoritas memperkuat dialog, partisipasi sosial, dan sikap saling menghormati. Pelaku usaha pariwisata menjembatani kebutuhan pengunjung dengan ketentuan budaya masyarakat. Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diimbangi perhatian memadai terhadap perlindungan fungsi sosial dan kesakralan ritual dalam kehidupan masyarakat lokal.

Tabel 1 menyajikan pembagian peran para aktor berdasarkan wawancara dan observasi serta keterkaitannya dengan pengembangan pariwisata budaya. Ringkasan tersebut menunjukkan bahwa setiap aktor memiliki tanggung jawab berbeda, tetapi saling melengkapi dalam menjaga keharmonisan sosial dan keberlanjutan kegiatan wisata. Pemangku adat menjalankan otoritas budaya, sedangkan pemerintah daerah mendukung kebijakan dan penyediaan infrastruktur. Pelaku pariwisata mengelola layanan serta interpretasi budaya, sementara tokoh agama minoritas memperkuat komunikasi lintas keyakinan dan partisipasi sosial. Pembagian tanggung jawab ini menegaskan pentingnya koordinasi antarpihak, khususnya ketika kepentingan komersial berpotensi berbenturan dengan kebutuhan keagamaan dan kepentingan masyarakat setempat.

**Tabel 1. Peran Aktor dalam Menjaga Keharmonisan dan Dampaknya terhadap
Pariwisata**

Aktor	Peran menjaga keharmonisan	Dampak pada pariwisata
Pemangku adat	Menyelenggarakan ritual adat, menetapkan aturan sosial, menegosiasikan jadwal ritual dengan pelaku wisata	Menjaga otentisitas dan kedalaman makna ritual; menjadi atraksi budaya yang bermakna
Pemerintah daerah	Kebijakan promosi, dukungan infrastruktur, regulasi pariwisata	Peningkatan kunjungan dan investasi; risiko komodifikasi jika tidak ada perlindungan budaya
Pelaku wisata	Layanan wisata, interpretasi budaya, penyesuaian paket wisata	Meningkatkan pendapatan lokal; membutuhkan pelatihan sensitivitas budaya
Tokoh agama minoritas	Fasilitasi dialog antaragama, partisipasi sosial-keagamaan, advokasi nilai toleransi	Memperkuat citra toleransi dan inklusivitas; mengurangi potensi konflik

Temuan selanjutnya menunjukkan bahwa komersialisasi budaya memengaruhi pelaksanaan ritual dan penyajian tradisi kepada wisatawan. Sejumlah informan mengungkapkan adanya perubahan jadwal, penyederhanaan rangkaian ritual, serta penonjolan unsur visual dan hiburan untuk memenuhi kebutuhan kunjungan. Penyesuaian tersebut memberikan peluang ekonomi, tetapi sekaligus menimbulkan kekhawatiran terhadap berkurangnya kesempatan masyarakat menjalankan tradisi sesuai makna spiritualnya. Penelitian juga menemukan bahwa promosi Bali sebagai kesatuan budaya berpotensi mengaburkan perbedaan tradisi antardesa dan pengalaman komunitas minoritas. Kondisi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pariwisata budaya perlu dinilai melalui pelestarian makna budaya dan pengakuan masyarakat sebagai pemilik tradisi.

Secara keseluruhan, penelitian mengidentifikasi keharmonisan sosial, kewenangan kelembagaan lokal, dan tekanan komersial sebagai tiga unsur yang memengaruhi pengembangan pariwisata budaya. Kerja sama dan musyawarah mendukung kerukunan, sedangkan keterlibatan pemangku adat serta tokoh agama membantu mengelola perbedaan kepentingan. Sebaliknya, dominasi orientasi ekonomi berpotensi meningkatkan tekanan terhadap pelaksanaan ritual dan penyederhanaan keragaman budaya. Temuan ini memperlihatkan bahwa masyarakat tidak menolak perubahan sepenuhnya, tetapi berupaya menentukan batas penyesuaian melalui kesepakatan bersama. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata budaya memerlukan tata kelola yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi, perlindungan tradisi, dan partisipasi lintas agama secara berkelanjutan.

Pembahasan

Keharmonisan antarumat beragama di Bali merupakan modal sosial yang berkembang melalui hubungan timbal balik, kepercayaan, dan kerja sama di tengah perbedaan keyakinan. Temuan mengenai menyama braya menunjukkan bahwa nilai lokal ini bukan hanya pedoman moral, melainkan landasan pengambilan keputusan ketika kepentingan sosial, adat, dan pariwisata beririsan. Wiwin menjelaskan bahwa pariwisata berbasis masyarakat menempatkan warga lokal sebagai pelaku utama pengembangan dan pengelolaan destinasi sekaligus mendukung pelestarian sumber daya budaya.¹³ Pandangan tersebut menegaskan bahwa keberlanjutan pariwisata memerlukan keterlibatan aktif masyarakat, bukan sekadar menjadikan kebudayaan sebagai produk. Keharmonisan perlu dirawat melalui praktik sosial dan keputusan kolektif yang adil berkelanjutan. Prinsip ini memperkuat legitimasi keputusan dan tanggung jawab bersama dalam masyarakat.

Nilai menyama braya juga memperlihatkan bahwa kearifan lokal menjadi mekanisme adaptasi saat masyarakat menghadapi perubahan akibat perkembangan pariwisata. Melalui musyawarah, pemangku adat, tokoh agama, dan pelaku usaha dapat mencari kesepakatan tanpa menghapus kepentingan masing-masing pihak. Januarta dan Lilasari menegaskan bahwa pengembangan wisata desa berkaitan dengan prinsip Tri Hita Karana, meliputi hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan.¹⁴ Kerangka ini menjelaskan bahwa keberhasilan destinasi budaya tidak hanya bergantung pada keuntungan ekonomi, tetapi juga kualitas relasi sosial dan tanggung jawab terhadap warisan lokal. Musyawarah perlu menghasilkan kesepakatan yang menghormati keyakinan serta melindungi kepentingan komunitas setempat secara seimbang. Kesepakatan tersebut mencegah dominasi kepentingan tertentu dalam proses pengambilan keputusan bersama.

Peran pemangku adat, pemerintah daerah, pelaku pariwisata, dan tokoh agama minoritas menunjukkan bahwa keharmonisan memerlukan pembagian kewenangan jelas serta komunikasi antarlembaga. Pemangku adat menjaga aturan budaya, sementara pemerintah dan pelaku usaha memastikan kegiatan wisata mengikuti ketentuan yang disepakati bersama. Putra menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Carangsari masih cenderung konsultatif dan pasif, sehingga kehadiran warga

¹³ I Wayan Wiwin, "Wisata Minat Khusus sebagai Alternatif Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Bangli," *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama dan Budaya* 2, no. 2 (2021): 42–52, <https://ojs.uhnsugriwa.ac.id/index.php/parbud/article/view/56>.

¹⁴ I Dewa Gede Ari Januarta dan Luh Nyoman Tri Lilasari, "Development of Kenderan Tourism Village Based on Local Wisdom Tri Hita Karana," *Journal of Applied Science in Tourism Destination* 3, no. 2 (2025): 9–15, <https://ejournal.ppb.ac.id/index.php/jastd/article/view/1580>.

belum menjamin kendali atas pembangunan pariwisata.¹⁵ Temuan tersebut menjadi pembanding penting karena keikutsertaan dalam forum tidak otomatis membuat aspirasi masyarakat menentukan keputusan. Keterlibatan lintas agama perlu diwujudkan melalui kewenangan nyata, transparansi, dan pengawasan bersama secara konsisten dan terbuka. Evaluasi terbuka membantu memastikan aspirasi semua kelompok diperhatikan secara proporsional dan berkelanjutan.

Komersialisasi budaya menjadi persoalan ketika kepentingan pasar menentukan bentuk, waktu, dan penyajian tradisi tanpa mempertimbangkan kebutuhan komunitas pemiliknya. Penyesuaian kegiatan wisata dapat meningkatkan daya tarik destinasi, tetapi perubahan tanpa kesepakatan berisiko melemahkan fungsi ritual sebagai praktik spiritual dan pengikat solidaritas sosial. Wirawan menunjukkan bahwa pariwisata berbasis kearifan lokal di Ubud menghadapi ketegangan antara pelestarian budaya dan komersialisasi, yang direspons masyarakat melalui negosiasi budaya serta partisipasi pengelolaan.¹⁶ Temuan tersebut sejalan dengan penelitian ini bahwa perubahan tradisi perlu dinegosiasikan, bukan ditentukan pasar semata. Komunitas harus berwenang menentukan bagian ritual yang boleh disaksikan wisatawan secara bertanggung jawab. Langkah tersebut menjaga manfaat wisata agar tidak menggeser nilai sakral tradisi masyarakat setempat.

Homogenisasi budaya juga perlu diperhatikan karena promosi destinasi kerap menampilkan identitas yang mudah dipahami pasar wisata. Penyederhanaan representasi dapat mengaburkan perbedaan tradisi lokal sekaligus membatasi kesempatan komunitas menjelaskan makna budayanya sendiri. Suardana, Putra, dan Atmaja menunjukkan bahwa seni pertunjukan hibrid dalam industri pariwisata Bali melibatkan kepemilikan komunal maupun institusional, dengan konsekuensi berbeda bagi penguasaan karya dan distribusi manfaat.¹⁷ Perspektif ini menunjukkan bahwa representasi budaya berkaitan dengan pihak yang menentukan makna, mengelola penyajian, dan menerima keuntungan ekonomi. Promosi wisata perlu mengakui keragaman lokal serta menghormati hak masyarakat atas warisan budayanya secara nyata. Pengakuan suara komunitas mencegah budaya lokal direduksi menjadi tontonan seragam yang kehilangan konteks dan makna.

¹⁵ Dewa Putu Bagus Pujawan Putra, "Pengembangan Desa Wisata Carangsari dan Partisipasi Masyarakat Lokal," *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 22, no. 2 (2020): 1–15, <https://ejournal.brin.go.id/jmb/article/view/10555>.

¹⁶ Putu Eka Wirawan, "Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Desa Wisata Ubud: Antara Komersialisasi dan Pelestarian Budaya," *Jurnal Ilmiah Pariwisata* 30, no. 2 (2025): 249–262, <https://jurnalpariwisata.iptrisakti.ac.id/index.php/JIP/article/view/1891>.

¹⁷ Gede Suardana, I Nyoman Darma Putra, dan Nengah Bawa Atmaja, "'The Legend of Balinese Goddesses': Komodifikasi Seni Pertunjukan Hibrid dalam Pariwisata Bali," *Modal Budaya Pariwisata Bali* 8, no. 1 (2018): 35–52, <https://ejournal1.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/view/5545>.

Pariwisata berbasis komunitas relevan untuk menyelaraskan manfaat ekonomi dengan perlindungan tradisi dan keharmonisan sosial. Partisipasi warga perlu meliputi penyusunan aturan kunjungan, penetapan batas akses ruang sakral, pembagian manfaat ekonomi, serta evaluasi dampak kegiatan wisata. Silitonga dan Wirawan menemukan bahwa pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Penglipuran mendukung partisipasi lokal dan pelestarian budaya, tetapi masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, pengelolaan pengunjung, dan pengaruh modernisasi.¹⁸ Temuan tersebut menegaskan bahwa masyarakat perlu menjadi pengambil keputusan, bukan sekadar penerima dampak pembangunan. Pelaksanaan pendekatan ini dapat diperkuat melalui forum lintas agama, pedoman etika wisata, dan pelatihan interpretasi budaya secara berkala. Evaluasi berkala memastikan kebijakan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perubahan kondisi destinasi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penjelasan terpadu tentang hubungan keharmonisan antarumat beragama, kewenangan kelembagaan adat, dan tekanan komersialisasi dalam dinamika pariwisata budaya Bali. Berbeda dari kajian yang memisahkan kerukunan sosial dan pengembangan destinasi, penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pariwisata bergantung pada kemampuan masyarakat menjaga keharmonisan sekaligus menentukan batas perubahan tradisi. Nilai menyama braya dipahami sebagai modal sosial dan landasan musyawarah untuk menegosiasikan kepentingan ekonomi, norma keagamaan, serta pelestarian budaya. Kerangka tersebut menempatkan komunitas lintas agama sebagai pelaku aktif yang berhak menentukan arah pengembangan destinasi dengan mempertimbangkan kebutuhan warga serta perlindungan ruang sakral lokal. Kontribusi ini dapat mendasari tata kelola pariwisata budaya yang partisipatif, inklusif, dan peka terhadap kesakralan tradisi lokal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keharmonisan antarumat beragama merupakan modal sosial penting bagi keberlanjutan pariwisata budaya di Bali. Penelitian kualitatif yang berlangsung pada Januari–Juni 2025 di tiga desa adat di Denpasar, Gianyar, dan Tabanan melibatkan 24 informan kunci. Temuan menunjukkan bahwa keharmonisan diwujudkan melalui interaksi sehari-hari, kerja sama sosial, penghormatan terhadap perbedaan

¹⁸ Duma Theresia Silitonga dan Putu Eka Wirawan, "Implementasi Community Based Tourism dalam Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan di Desa Penglipuran, Bali," *Jurnal Pariwisata, Bisnis dan Digital* 2, no. 1 (2026): 214–240, <https://jurnalpariwisata.iptrisakti.ac.id/index.php/JPBD/article/view/2046>.

keyakinan, dan musyawarah untuk menyelesaikan persoalan bersama. Nilai menyama braya menghubungkan toleransi, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif, sedangkan pemangku adat, tokoh agama, pemerintah daerah, serta pelaku pariwisata menjalankan peran yang saling melengkapi. Namun, kerukunan bukan keadaan otomatis, melainkan proses berkelanjutan yang memerlukan komunikasi, kepercayaan, dan kesepakatan bersama. Pariwisata menghadirkan manfaat ekonomi sekaligus tekanan berupa perubahan jadwal ritual, penyederhanaan upacara, penonjolan hiburan, dan penyeragaman representasi budaya. Karena itu, keberhasilan tidak cukup diukur melalui daya tarik destinasi atau keuntungan ekonomi, tetapi juga melalui perlindungan nilai spiritual, keragaman tradisi, keharmonisan sosial, dan kewenangan masyarakat atas warisan budayanya secara adil dan bertanggung jawab.

Faktor pendukung keharmonisan mencakup kearifan lokal, dialog terbuka, peran pemangku adat dan tokoh agama, partisipasi warga, serta dukungan pemerintah dan pelaku pariwisata. Sebaliknya, dominasi orientasi ekonomi, lemahnya perlindungan ruang sakral, dan keputusan yang mengabaikan keterlibatan substantif masyarakat dapat menghambat keberlanjutan kerukunan. Oleh sebab itu, pengembangan pariwisata budaya perlu menerapkan tata kelola berbasis komunitas yang menjamin keterlibatan seluruh kelompok agama, transparansi pembagian manfaat, perlindungan kesakralan ritual, serta penghormatan terhadap perbedaan tradisi antardesa. Langkah konkretnya meliputi pembentukan forum lintas agama, penyusunan pedoman etika kunjungan, pelatihan sensitivitas budaya bagi pelaku wisata, dan evaluasi berkala atas dampak sosial pariwisata. Kebaruan penelitian ini terletak pada penjelasan terpadu tentang keterkaitan keharmonisan antarumat beragama, kewenangan kelembagaan adat, dan tekanan komersialisasi dalam membentuk dinamika pariwisata budaya Bali. Dengan demikian, masyarakat harus ditempatkan sebagai pengambil keputusan utama, bukan sekadar penerima manfaat ekonomi. Pendekatan ini diharapkan menjaga keseimbangan kepentingan pariwisata, kelestarian budaya, penghormatan keyakinan, dan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat Bali.

REFERENSI

- Baxter, Pamela, dan Susan Jack. "Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers." *The Qualitative Report* 13, no. 4 (2008): 544–559. <https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol13/iss4/2/>.
- Enworo, Oko Chima. "Application of Guba and Lincoln's Parallel Criteria to Assess Trustworthiness of Qualitative Research on Indigenous Social Protection Systems." *Qualitative Research Journal* 23, no. 4 (2023): 372–384.

- <https://www.emerald.com/qrj/article/23/4/372/359623/Application-of-Guba-and-Lincoln-s-parallel>.
- Halimatusa'diah. "Peranan Modal Kultural dan Struktural dalam Menciptakan Kerukunan Antarumat Beragama di Bali." *Jurnal Multikultural dan Multireligius* 17, no. 1 (2018): 43–65. <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/harmoni/article/view/207>.
- Indrianto, Agoes Tinus. "The Commodification of Culture in Bali in the Frame of Cultural Tourism." *ASEAN Journal on Hospitality and Tourism* 4, no. 2 (2005): 151–165. <https://journals.itb.ac.id/index.php/ajht/article/view/3031>.
- Iskandar, Eva Tabitha Aurelia, dan Dewanta Facrureza. "Peran Event Budaya Ogoh-Ogoh dalam Memperkenalkan Budaya Asli Bali kepada Wisatawan Lokal." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 11, no. 2 (2026): 300–323. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/55681>.
- Januarta, I Dewa Gede Ari, dan Luh Nyoman Tri Lilasari. "Development of Kenderan Tourism Village Based on Local Wisdom Tri Hita Karana." *Journal of Applied Science in Tourism Destination* 3, no. 2 (2025): 9–15. <https://ejournal.ppb.ac.id/index.php/jastd/article/view/1580>.
- Kallio, Hanna, Anna-Maija Pietilä, Martin Johnson, dan Mari Kangasniemi Docent. "Systematic Methodological Review: Developing a Framework for a Qualitative Semi-Structured Interview Guide." *Journal of Advanced Nursing* 72, no. 12 (2016): 2954–2965. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jan.13031>.
- Kawulich, Barbara B. "Participant Observation as a Data Collection Method." *Qualitative Inquiry: Research, Archiving, and Reuse* 6, no. 2 (2005): 1–28. <https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/466>.
- Nowell, Lorelli S., Jill M. Norris, Deborah E. White, dan Nancy J. Moules. "Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria." *International Journal of Qualitative Methods* 16, no. 1 (2017): 1–13. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1609406917733847>.
- Pujaastawa, Ida Bagus Gede, I Putu Sudana, dan Bambang Dharwiyanto Putro. "Daya Tarik Wisata Pura Langgar: Representasi Persaudaraan Hindu-Islam di Bali." *Jurnal Kajian Bali* 9, no. 2 (2019): 521–546. <https://ejournal1.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/view/4391>.
- Putra, Dewa Putu Bagus Pujawan. "Pengembangan Desa Wisata Carangsari dan Partisipasi Masyarakat Lokal." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 22, no. 2 (2020): 1–15. <https://ejournal.brin.go.id/jmb/article/view/10555>.
- Putra, Erfa Arya, dan I Gusti Agung Oka Mahagangga. "Faktor Penyebab Komodifikasi Tari Barong sebagai Atraksi Wisata di Desa Batubulan." *Jurnal Destinasi Pariwisata* 9, no. 1 (2021): 234–240. https://www.researchgate.net/publication/362884452_Faktor_Penyebab_Komodifikasi_Tari_Barong_Sebagai_Atraksi_Wisata_Di_Desa_Batubulan.
- Silitonga, Duma Theresia, dan Putu Eka Wirawan. "Implementasi Community Based Tourism dalam Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan di Desa Penglipuran, Bali." *Jurnal Pariwisata, Bisnis dan Digital* 2, no. 1 (2026): 214–240. <https://jurnalpariwisata.iptrisakti.ac.id/index.php/JPBD/article/view/2046>.
- Soi, Andi Bahri, Adhitia Pahlawan Putra, Muhammad Kamal Zubair, Andi Markarma

- Yusup, dan Adi Megandani. "Promoting Religious-Friendly Tourism for Developing Religious Harmony: A Study of Tourist Gaze." *Heritage of Nusantara* 12, no. 1 (2023): 91–117. <https://heritage.kemenag.go.id/index.php/heritage/article/view/701>.
- Suardana, Gede, I Nyoman Darma Putra, dan Nengah Bawa Atmaja. "'The Legend of Balinese Goddesses': Komodifikasi Seni Pertunjukan Hibrid dalam Pariwisata Bali." *Modal Budaya Pariwisata Bali* 8, no. 1 (2018): 35–52. <https://ejournal1.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/view/5545>.
- Wirawan, Putu Eka. "Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Desa Wisata Ubud: Antara Komersialisasi dan Pelestarian Budaya." *Jurnal Ilmiah Pariwisata* 30, no. 2 (2025): 249–262. <https://jurnalpariwisata.iptrisakti.ac.id/index.php/JIP/article/view/1891>.
- Wiwin, I Wayan. "Wisata Minat Khusus sebagai Alternatif Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Bangli." *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama dan Budaya* 2, no. 2 (2021): 42–52. <https://ojs.uhnsugriwa.ac.id/index.php/parbud/article/view/56>.
- Yamashita, Shinji. "Gema Perdamaian: Tourism, Religion and Peace in Multicultural Bali." *Jurnal Kajian Bali* 2, no. 2 (2012): 165–181. <https://ejournal1.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/view/5706>.